

PERANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Dino Predi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Role of Food Security Agency Improvement of Food Security. The research was motivated by the food situation in Riau province that relies heavily on the distribution of food from outside the region and even abroad main staple foods such as rice and other carbohydrate sources. The research was conducted at the National Food Security Riau Province with the internal speakers of the Food Security Agency Riau and other competent parties in this matter. Data was collected through interviews and documentation were then analyzed using descriptive techniques. The results of this study indicate that the Food Security Agency Riau Province has been working to improve food security in the province of Riau through various strategic programs contained in the Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Efforts undertaken include coordination among local institutions associated with increased local food security, food security condition data inventorying, distribution of food between regions, accelerating diversification of food consumption, handling areas of food insecurity, institutional food security, empowerment barns.

Abstrak: Peranan Badan Ketahanan Pangan Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pangan di Provinsi Riau yang sangat bergantung pada distribusi pangan dari luar daerah bahkan luar negeri utamanya pangan pokok seperti beras dan sumber karbohidrat lainnya. Penelitian ini dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan narasumber internal dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau serta berbagai pihak yang kompeten dalam persoalan ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah berupaya meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau melalui berbagai program strategis yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Usaha-usaha yang dilakukan antara lain koordinasi antar lembaga daerah yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan daerah, inventarisir data kondisi ketahanan pangan, distribusi pangan antar daerah, percepatan diversifikasi konsumsi pangan, penanganan daerah rawan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, pemberdayaan lumbung pangan.

Kata Kunci: Ketahanan pangan, peranan, program dan anggaran

PENDAHULUAN

Perkembangan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan sektor agraria di Indonesia juga turut seiring dengan kebijakan desentralisasi yang berkembang pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru di bawah panglima besarnya Presiden Soeharto. Desentralisasi dengan jargon otonomi daerah menuntut adanya pembagian kewenangan yang lebih kuat dan tegas pada level daerah sehingga daerah berhak membuat kebijakan yang strategis terkait dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Demikian juga halnya dengan Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dan potensi alam yang luar biasa banyaknya.

Peningkatan ketahanan pangan tentunya menjadi motor penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus pembangunan, terutama fokus pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan pentingnya peningkatan ketahanan pangan melalui Peraturan Daerah No. 30 Tahun 2001 adalah tepat mengingat letak geografis Provinsi Riau yang strategis sehingga secara langsung akan berhadapan dengan negara tetangga di dalam kancah persaingan global. Oleh sebab itu, diperlukan ketangguhan ekonomi dan sosial budaya sehingga sudah barang tentu peranan pangan sangat penting karena berkaitan langsung

dengan kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia.

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi, Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu institusi penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Riau juga melakukan pembaharuan terhadap peran dan tugas pokok organisasinya. Setelah melalui kajian yang mendalam, pembaharuan tersebut diwujudkan dalam bentuk perubahan paradigma yang ditegaskan dalam visi BKP, yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas tahun 2020.”

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Riau selama empat tahun terakhir (2006-2010) terutama beras mengalami peningkatan produksi sebesar 5,73 % pertahun, namun Provinsi Riau hanya mampu mendukung maksimal 45 % kebutuhan konsumsi penduduk. Untuk melengkapi pangan (beras) harus didatangkan dari luar Provinsi Riau, baik antar provinsi maupun antar negara. Kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa pertumbuhan produksi belum mampu mencukupi perkembangan kebutuhan. Kebutuhan konsumsi penduduk dan ketersediaan pangan (beras) di Provinsi Riau tergantung pada kelancaran dan kesinambungan/distribusi pangan baik antar provinsi maupun impor (LAKIP BKP Provinsi Riau, 2010).

Hubungan konsumsi perkapita penduduk dengan tingkat pengeluaran perkapita penduduk perbulan dapat memberikan gambaran kualitas konsumsi penduduk dan gambaran potensi ancaman kerawanan pangan ditinjau dari aspek pendapatan. Untuk Provinsi Riau terdapat 1.315.359 jiwa (24,78 %) penduduk mengkonsumsi kalori dibawah 1.500 kal/kapita/hari, yang berarti merupakan indikator kerawanan gizi masyarakat dan menunjukan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh akses pangan yang bergizi. Sedangkan 2.612.233 jiwa (49,21 %) merupakan penduduk yang berpotensi rawan pangan karena diindikasikan hanya mampu mengkonsumsi kalori antara 1.500 kal sampai 2.000 kal/kapita/hari dan hanya 26,01 % penduduk yang mampu mengonsumsi kalori

diatas 2.200 kal/kapita/hari. Perlu dicermati bahwa jumlah kalori yang cukup belum tentu dapat menjamin keragaman dan mutu asupan pangan yang dibutuhkan manusia (LAKIP BKP Provinsi Riau, 2010).

Persoalan mendasarnya adalah program peningkatan ketahanan pangan yang dirancang dalam rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah belum menunjukkan hasil yang nyata. Sampai saat ini Riau belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, artinya secara tidak langsung program peningkatan ketahanan pangan belum berhasil. Setidaknya pada tahun 2010 silam terdapat beberapa kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Riau, hal ini kontras dengan stempel Riau sebagai daerah yang kaya. Ketahanan pangan selain dilihat dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup juga dilihat dari kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan, dari dua aspek itu Provinsi Riau tergolong dalam wilayah rawan pangan.

Memang Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya peningkatan pangan dengan menggalakkan beberapa program strategis sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Provinsi Riau sendiri. Upaya itu diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana/modal bagi petani, peningkatan infrastruktur pertanian serta distribusi pupuk. Akan tetapi program-program itu tidak berkelanjutan sampai pada fase distribusi dan *market* hasil pertanian masyarakat di pasar domestik. Akibatnya adalah hasil pertanian masyarakat hanya menjadi kegiatan seremonial pemerintah dalam bentuk panen raya yang mendatangkan pejabat ke daerah-daerah sentra pertanian yang kemudian diliput oleh berbagai media.

Jika ditinjau dari aspek kebijakan, program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui BKP hampir mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sebab kebijakan pangan pada era Orde Baru kurang begitu berhasil dan akar utamanya kesalahannya terletak pada sistem monopoli pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan. Monopoli dalam formulasi

kebijakan pangan telah menyebabkan timbulnya arogansi penguasa sehingga tidak menghiraukan aspirasi masyarakat. Praktik demikian merupakan salah satu kegagalan kebijakan pangan (*government's failure*) karena tidak partisipatif dan menumbuhkembangkan *rational ignorant* suatu sikap yang tumbuh di masyarakat untuk memilih diam atas kebijakan pemerintah.

Kebijakan pangan pada masa Orde Baru juga diwarnai dengan pendekatan *top down* (Simatupang, 1999). Gejala seperti itu hampir sama dengan yang terjadi di Provinsi Riau, masyarakat memilih diam manakala kebijakan pemerintah yang dibuat tidak partisipatif dan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat pada level bawah. Gejala rawan pangan itu tentunya harus ditanggapi dengan serius mengingat Provinsi Riau dipandang sebagai salah satu gerbang ekonomi Indonesia di wilayah Barat.

Pada mulanya pengertian ketahanan pangan terfokus pada kondisi pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Namun, berdasarkan kesepakatan pada *International Food Submitt and International Conference of Nutrition 1992*, pengertian ketahanan pangan diperluas menjadi kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pengertian ketahanan pangan yang terakhir ini bersifat holistik dan mengandung makna yang selaras dengan paradigma baru kesehatan. Makna yang terkandung dalam pengertian ketahanan pangan tersebut mencakup dimensi fisik pangan (ketersediaan), dimensi ekonomi (daya beli), dimensi pemenuhan kebutuhan gizi individu (dimensi gizi) dan dimensi nilai-nilai budaya dan religi (pola pangan yang sesuai untuk hidup sehat, aktif dan produktif serta halal), dimensi keamanan pangan (kesehatan) dan dimensi waktu (tersedia secara berkesinambungan) (Suryana, 2005).

Maxwell dan Smith (1997) mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu. Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yaitu: a) kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup

sehat, b) akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli pangan maupun menerima pemberian pangan, c) jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan dan d) waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pangan di Provinsi Riau yang sangat bergantung pada distribusi pangan dari luar daerah bahkan luar negeri utamanya pangan pokok seperti beras dan sumber karbohidrat lainnya.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan narasumber internal dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau serta berbagai pihak yang kompeten dalam persoalan ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan BKP dalam Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan ketahanan pangan sudah menjadi isu nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak sebagai upaya penguatan kapasitas dan daya saing bangsa. Masalah utama secara nasional yang berkenaan dengan pemantapan ketahanan pangan itu antara lain;

1. Kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan mengakses pangan.
2. Ketergantungan konsumsi beras masih cukup tinggi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian.
3. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas (hanya beras dan dikelola oleh pemerintah pusat), sementara cadangan pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk, karena budaya

dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

5. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.
6. Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
7. Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi baik darat dan terlebih antar pulau, sehingga meningkatkan biaya distribusi pangan.
8. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.

Permasalahan itu tentunya juga menjadi permasalahan utama di daerah karena pada dasarnya perkembangan daerah sangat bergantung pada kualitas kehidupan warganya. Oleh sebab itu, memang kondisi ketahanan pangan baik secara nasional maupun lokal yang masih tergolong dalam kondisi rawan pangan, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam usaha peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Sekalilagi patut ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi dimana masyarakat memiliki daya beli terhadap pangan dan mampu mengakses kebutuhan pangan mereka.

Riau sebagai provinsi terbesar pendapatan daerahnya belum menunjukkan kemajuan yang berarti dari aspek produksi pangan dibandingkan dengan era orde baru, malahan komoditas pangan tertentu mengalami defisit yang semakin bertambah. Penduduk Riau bermata pencaharian pada lapangan usaha pertanian sebanyak 44,11% (tahun 2006), dimana sebagian besar penduduk miskin berada pada kelompok masyarakat ini yang dominan bermukim di perdesaan. Dari kedua kondisi ini menggambarkan keluarga tani dengan berbagai masalah kehidupannya, selalu berada pada posisi lemah.

Memang persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang sangat rumit dan membutuhkan perhatian ekstra dari semua pihak. Terlebih dengan semakin maraknya perubahan

orientasi masyarakat untuk bekerja di sektor industri serta semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan semakin berdampak pada rendahnya produktivitas pangan daerah serta minimnya ketersediaan pangan di daerah khususnya di Riau. Dampak ikutan dari hal itu tentu saja ketergantungan Riau terhadap pasokan pangan dari luar daerah, pusat maupun luar negeri.

Keberadaan BKP daerah tentu saja tidak begitu bermanfaat tanpa diiringi oleh kapasitas penyusunan kebijakan yang berkenaan dengan pemantapan ketahanan pangan di daerah. Walaupun demikian setidaknya BKP Provinsi Riau telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketahanan pangan di Riau melalui berbagai kegiatan.

1. Koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan pengembangan ketahanan pangan melibatkan banyak pelaku dari berbagai aspek serta mencakup interaksi antar wilayah, oleh sebab itu pengembangan dan pemantapan petahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerja kreatif dari seluruh pihak yang terkait. Koordinasi antara BKP Provinsi Riau dengan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Riau didasarkan pada Keputusan Gubernur No. Kpts. 101/HI/2007 dan telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bertugas membantu Gubernur dalam:

- Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan memerhatikan kebijakan yang ditetapkan DKP Pusat.
- Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

BKP Provinsi Riau yang dalam Keputusan Gubernur sebagai Sekretariat DKP Provinsi Riau memfasilitasi Rapat Koordinasi DKP tingkat provinsi dengan tujuan untuk membangun koordinasi program ketahanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan juga merupakan forum strategis yang diadakan secara berkala

dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mendiskusikan dan membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun ketahanan pangan.

Pelaksanaan Koordinasi DKP dilaksanakan melalui forum Rapat DKP yang melibatkan Dinas/Badan selaku anggota DKP tingkat provinsi yang terdiri dari :

- Rapat Koordinasi DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Teknis Provinsi
- Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Ahli Provinsi

Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Aspek Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- Menurunkan angka kemiskinan 1% setiap tahun melalui “*Crash Program*” peningkatan produktivitas dan percepatan Program K2I.
- Meningkatkan aktivitas penyuluhan yang profesional dipedesaan dan berfokus pada penerapan teknologi budidaya dan penciptaan pasar.
- Menggalang kerjasama antar daerah/wilayah terutama dalam hal informasi ketersediaan pangan melalui pembentukan dan pengembangan jaringan kerja (*net working*).
- Penegasan batas-batas hutan dan pengembangan wilayah komoditi “dominan” dengan memantapkan dan memperbarui data peta perwilayahan komoditi pertanian yang sudah ada guna mencegah kerusakan sumber daya alam dan alih fungsi lahan pertanian. Pada masing-masing Kabupaten/Kota agar dapat melakukan up-dating peta wilayah komoditi pertanian yang baru dan dijabarkan sampai tingkat kecamatan. Menurut Bapak Ir. Hermansyah (Ka. Sub Bid. Distribusi Pangan), penegasan batas-batas hutan inilah yang selalu mengalami kesulitan penyelesaian dikarenakan selalu dihadapkan dengan masalah tanah hulayat.
- Mengawasi terus menerus jalannya proses distribusi terutama tingkat harga komoditi pangan serta meningkatkan fungsi jembatan

timbang sebagai pemantau distribusi pangan.

b. Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

- Pengembangan teknologi pangan dan promosi pangan lahan berlahan baku lokal dilakukan secara merata dan berkesinambungan.
- Sosialisasi dan demonstrasi tentang diversifikasi pangan dan gizi seimbang dalam upaya penurunan angka penderita gizi buruk $\pm 2\%$ per tahun.

2. Penyusunan Program/Kegiatan BKP Provinsi Riau, yakni:

- a. Revitalisasi SKPG Melalui Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
- b. Penyusunan Statistik Pangan
- c. Program Aksi Desa Mandiri Pangan
- d. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (Pondok Pesantren)
- e. Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
- g. Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan
- h. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
- i. Replikasi SPFS
- j. Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
- k. Koordinasi Pengembangan Pasca Panen
- l. Rembug, Mimbar Sarasehan dan Pembinaan Kontak Tani Nelayan Andalan
- m. Penyuluhan Ketahanan Pangan kepada Kelompok Masyarakat
- n. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
- o. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Riau
- p. Lomba Cipta Menu Propinsi dan Nasional
- q. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
- r. Koordinasi dan Pembinaan Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan
- s. Pembangunan TAmam Percontohan PKK Provinsi Riau (Pemanfaatan lahan pekarangan di belakang kediaman Gubri)

Persoalannya adalah program-program dan kegiatan itu tidak ada yang secara nyata terlak-

sana dengan baik dan berkesinambungan, sifatnya hanya temporer dan sesuai isu komtemporer yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

3. Pendataan Kondisi Ketahanan Pangan

Kecukupan ketersediaan komoditas pangan dan keterjangkauan daya beli rumah tangga atau individu merupakan indikator utama dari sistem ketahanan pangan. Ketersediaan pangan dapat bersumber dari produksi pangan domestik atau pemasukan pangan. Pemasukan pangan itu sendiri dapat bersumber dari pemasukan pangan dari daerah lain atau impor pangan dari luar negeri. Dalam konteks ini, impor pangan dari luar negeri hanya berperan sebagai penutup kekurangan produksi domestik. Namun dalam praktiknya impor pangan dari luar negeri sekarang sudah menjadi aktivitas yang primer sehingga baik secara nasional maupun lokal, kecukupan pangan sangat bergantung pada impor yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Selain itu, selama periode 2004-2008 perluasan areal panen dan peningkatan penggunaan pupuk pada pertanian tanaman pangan memang telah mendorong peningkatan produksi pada sebagian besar kelompok komoditas pangan. Secara umum produksi keseluruhan komoditas pangan meningkat sebesar 1,97%, kondisi ini merupakan perkembangan yang cukup menggembirakan terutama peningkatan yang terjadi pada produksi beras. Hal ini mengingat relatif terbatasnya potensi areal persawahan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi di Provinsi Riau. Komoditas kedelai dan sayuran mencatat pertumbuhan tertinggi pada kelompok tanaman pangan yaitu mencapai 26,61% dan 18,87%. Produksi beras dan jagung masing-masing meningkat sebesar 2,16% dan 3,43%. Tiga komoditas lainnya ternyata mengalami penurunan produksi yaitu kacang tanah, buah-buahan dan ikan.

Meskipun produksi sebagian besar komoditas pangan menunjukkan perkembangan yang meningkat selama periode 2004-2008, sebagai daerah yang mengalami defisit pangan dalam jumlah yang cukup besar, peningkatan ini ter-

nyata masih belum mampu mengurangi laju peningkatan pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap hampir seluruh komoditas pangan dasar yang bergerak lebih cepat dibandingkan peningkatan produksi pangan lokal telah berakibat pada meningkatnya pasokan pangan ke Provinsi Riau yang mencapai 3,23% selama periode 2004-2008.

4. Distribusi Pangan

Komponen yang tidak kalah penting dalam perhitungan ketersediaan pangan adalah pemasukan pangan dari luar Provinsi Riau, baik antar Provinsi bahkan antar negara. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Dalam membangun kemandirian pangan, idealnya peran pasokan dari luar semakin hari semakin menurun dan digantikan dengan peningkatan peran produksi domestik. Namun data yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan pasokan dari luar Provinsi untuk keempat komoditas pangan yang dimaksud ternyata masih cukup tinggi dan buah-buahan menempati peringkat tertinggi untuk peningkatan pasokan dari luar, jumlah pemasukan komoditas pangan dari luar Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Komoditas yang paling dominan dalam pasokan pangan dari luar Provinsi Riau adalah beras (>46,5%) dari total pasokan pangan dengan trend yang semakin meningkat (1,85%). Kondisi tersebut akibat kemampuan produksi beras hanya mampu mendukung maksimal 57% kebutuhan konsumsi penduduk. Jumlah beras yang masuk, tidak semuanya dikonsumsi di dalam provinsi namun didistribusikan kembali menuju beberapa provinsi tetangga. Pasokan pangan dari luar daerah Riau yang mengalami peningkatan yang terbesar setiap tahunnya adalah daging (25,32%), kedelai (19,17%), ubi jalar (16,24%), buah-buahan (13,48%).

5. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Subsistem konsumsi pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan penting yang dilaksanakan di Provinsi Riau adalah Gerakan Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan 3B Plus (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman).

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan konsumsi pangan beragam dengan gizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga/perorangan dan masyarakat. Untuk mempercepat diversifikasi pangan yang sudah berjalan cukup lama, dilakukan *trigger mechanisms* dengan pendekatan kampanye, penyuluhan dan sosialisasi tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; serta pengembangan model untuk penguatan modal usaha agroindustri berskala rumah tangga/UMKM pangan. Dengan kampanye tersebut informasi dapat disebarluaskan secara luas yang didukung dengan jumlah produsen pangan yang siap menyediakan pangan di tingkat rumah tangga. Adapun kegiatan yang dirancang adalah pemberian PMUK pengembangan diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal kepada UMKM/agroindustri pedesaan, program makan siang yang beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak Sekolah Dasar, serta mengadakan kampanye pangan beragam, bergizi seimbang, serta aman melalui media cetak dan elektronik.

Dalam upaya meningkatkan upaya perbaikan gizi terutama pada kelompok rawan pangan dan gizi yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah lima tahun (balita) dan anak sekolah (SD/MI), mulai tahun 2008 program percepatan diversifikasi pangan diintegrasikan dengan program peningkatan asupan zat gizi dan pengasuhan gizi masyarakat pada Desa Mandiri Pangan, melalui pengembangan agribisnis di pedesaan dengan memproduksi pangan untuk mendukung gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman (feeding program) dalam upaya mendorong perbaikan gizi keluarga di pedesaan. Kegiatan dilakukan melalui program pengembangan pangan lokal, pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan konseling gizi, serta peningkatan

kerjasama kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan (seperti posyandu, kelompok tani/gapoktan, BPP, puskesmas). Mulai tahun 2008 untuk mengembangkan ekonomi dan gizi keluarga akan diadakan ujicoba pengembangan perbaikan ekonomi dan gizi keluarga melalui pengembangan bisnis dan industri pangan berbasis sumberdaya lokal.

Tim Pangan Desa dalam Program Desa Mandiri Pangan yang beranggota Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK, dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Pertanian dan Penyuluh Gizi dan Kesehatan berperan dalam mengkoordinasikan program ini, terutama mengintegrasikan perbaikan ekonomi dan gizi keluarga tani.

Disamping itu, dilakukan peningkatan partisipasi mahasiswa/Perguruan Tinggi dan swasta dalam percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui penyuluhan, pameran, workshop, seminar, dan kerja lapangan. Mulai tahun 2008 gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman akan diuji cobakan bagi anak sekolah (SD/MI), setiap Kabupaten 2 desa dan lokasinya diluar desa mandiri pangan.

6. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kegiatan pendukung dalam upaya menurunkan prevalensi Kerawanan Pangan pada tahun 2008 ditempuh beberapa kegiatan antara lain:

- a. Pemantauan dan analisis akses pangan daerah, merupakan kajian terhadap kondisi akses pangan daerah yang memiliki keterkaitan hubungan dengan prevalensi kerawanan pangan.
- b. Analisis dan Pemetaan Kerawanan Pangan, merupakan tindak analisis terhadap indikator-indikator kerawanan pangan dengan memperhatikan kondisi wilayah. Keluaran dari kajian tersebut selain peta kerawanan pangan juga rancangan sasaran Pembangunan Desa Mandiri Pangan.

7. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kelembagaan ketahanan pangan sebagai pelaksana fungsi ketahanan pangan di daerah

merupakan salah satu syarat tercapainya kondisi ketahanan pangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Struktur organisasi Unit Kerja Ketahanan Pangan di kabupaten/kota yang telah terbentuk masih sangat beragam baik dari tinjauan status struktur organisasi maupun kelengkapan personil dan dukungan pembiayaan.

Sebagai gambaran kelembagaan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2007 baru terbentuk 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kampar, Kabupten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya masih belum terbentuk atau sedang dalam proses reorganisasi struktur. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah secara teratur dilakukan melalui mekanisme koordinasi DKP yang merupakan forum koordinasi lintas *stakeholders* dalam penyelenggaraan fungsi ketahanan pangan di provinsi Riau.

Koordinasi seluruh pelaksana fungsi ketahanan pangan daerah melalui forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang di ketuai oleh Gubernur Riau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan pendukung yang tidak kalah penting dalam menciptakan kinerja koordinasi pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di Provinsi Riau pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, merupakan upaya pengembangan kelembagaan pangan di pedesaan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga.
2. Pengembangan Kelembagaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), merupakan upaya koordinasi lintas stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam menjalankan fungsinya.
3. Pemberdayaan LM3 sebagai upaya untuk membangun kapasitas sosial dan ekonomi di lingkungan Pondok Pesantren.

4. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau untuk memperkuat kelembagaan dan memantapkan Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah.
5. Sosialisasi dan Penyebaran informasi tentang ketahanan pangan untuk membuka wawasan masyarakat secara umum dan peningkatan keterampilan kelompok masyarakat sasaran kegiatan.

8. Pemberdayaan Lumbung Pangan

Salah satu upaya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat adalah dengan mengaktifkan cadangan pangan masyarakat di lumbung pangan. Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu sarana penunjang ketahanan pangan, yang perlu direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemenuhan cadangan pangan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan, karena keberadaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Revitalisasi tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan, tidak hanya dalam menjalankan fungsi sosial tetapi juga fungsi ekonomi bagi anggotanya.

9. Penyusunan Kebijakan Program, Monitoring Evaluasi dan Data Base

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program, Monitoring Evaluasi dan Data Base Ketahanan Pangan diarahkan untuk :

- (1) Pemantauan, monitoring, analisis data base dan perumusan kebijakan ketahanan pangan;
- (2) Penyelenggaraan operasional dan manajemen BKP di Provinsi.

Kegiatan pemantauan, monitoring, analisis data base dan perumusan kebijakan Ketahanan

Pangan mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi ketahanan pangan (ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, distribusi dan harga pangan, pola konsumsi dan keamanan pangan). Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara cepat dan periodik pelaksanaannya, sehingga bisa secara cepat dijadikan pertimbangan untuk perumusan kebijakan dan pemecahan masalah ketahanan pangan pada tingkat kabupaten dan propinsi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan ketahanan pangan masyarakat yang cukup kompleks, maka kegiatan yang dirancang adalah sosialisasi dan penumbuhan sistem pelaporan dan evaluasi yang efektif. Kegiatannya dilakukan di 11 kabupaten/kota, dan ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan ketahanan pangan secara faktual sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan di daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi BKP dalam Usaha Peningkatan Ketahanan Pangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi BKP Provinsi Riau dalam usaha peningkatan ketahanan di Provinsi Riau tahun 2006-2010:

1. Koordinasi Tidak Berjalan Lancar Antara Pemerintah Propinsi Dengan Kabupaten/ Kota
2. Keragaman Pangan Dan Keberimbangan Gizi Untuk Konsumsi Penduduk Riau Yang Masih Perlu Diperbaiki
3. Prevalensi Daerah Yang Berpotensi Rawan Pangan
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia
6. Keterbatasan Dana Pelaksanaan Kegiatan (Dukungan Anggaran)

Selain faktor-faktor di atas, secara khusus ditemui kendala dalam peningkatan produktivitas dan produksi pangan di Provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah:

1. Masih tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial);
2. Kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampi mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi;
- 3.) Terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani;
- 4.) Kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu;
- 5.) Jenis tanah yang didominasi oleh podzolik merah kuning dan jenis lahan lain relatif kurang responsif terhadap penggunaan input kimiawi;
- 6.) Sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan
- 7.) Rendahnya akses petani terhadap modal usaha

PENUTUP

Upaya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam usaha peningkatan ketahanan pangan di Riau sudah melalui perencanaan yang baik. Seluruh Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sudah berjalan, meskipun pada realitanya belum berjalan lancar sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau perlu untuk mendesak kepada Gubernur untuk segera merealisasikan menambah kelembagaan ketahanan pangan disetiap daerah agar koordinasi pembangunan ketahanan pangan dapat dilakukan secara terarah dan menambah porsi dana kegiatan pembangunan pangan kedalam APBD agar masalah minimnya dana kegiatan dapat teratasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. 2009. Laporan Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2010
- Maxwell, S. dan Smith, M. 1997. Household And Food Secutity :A Conceptual Review *dalam* Simon Maxwell dan Timothy R. Frankenberger (eds) Household Food Security : Concept, Indicator, Measurement, Uniceps. New York.
- Pantjar Simatupang. 1999. *Analisis Kebijakan: Konsep dasar Prosedur Pelaksanaan (Policy Analysis: Basic Concept and Procedures)*. Prosiding.
- Suryana A 2001. *Critical Review On Food Security In Indonesia*. Makalah pada Seminar Nasional Ketahanan Pangan. Jakarta.